

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA
WISATA**

**(Penelitian di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintah Daerah



Oleh:

Sinta Apriyani

18610035

PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022

PENGESAHAN TESIS

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA
WISATA**

**(Penelitian di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kashian Kabupaten
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Oleh:

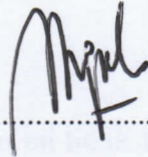
Sinta Apriyani

18610035

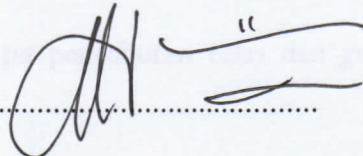
Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal , 8 Januari 2022

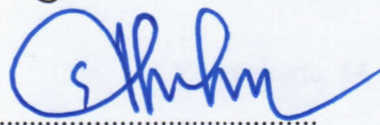
Pembimbing (Ketua Tim Penguji)
Dr. E.W. Tri Nugroho



Penguji I
Dr. R. Widodo Triputro



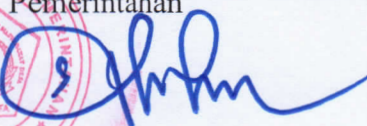
Penguji II
Dr. Supardal, M.Si



Yogyakarta, 8 Januari 2022

Mengetahui

Direktur Program Magister Ilmu
Pemerintahan



Dr. Supardal, M.Si

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Apriyani

Nomer Mahasiswa : 18610035

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis berjudul **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA (Penelitian di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam taks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 14 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Sinta Apriyani

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan Do'a dan dukungannya untuk melanjutkan studi S2 hingga bisa menyelesaikannya
2. Untuk Ibu Kandung saya almarhumah Ibu Srisayekti
3. Untuk keluarga besar Bapak Suwardi, S.Pd. yang selalu memberikan Suport dan dukungannya
4. Dan untuk Rizki Aji Wihandoko, S.Pd yang sudah banyak mensupport dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

MOTTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(QS. Al-Baqarah:286)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA (Penelitian Di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta).

Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di bidang Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini menjadi jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami perlukan. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
2. Dr. Supardal, M.Si, selaku Direktur Program Magister (S-2) Ilmu Pemerintahan
3. Dr. EW. Tri Nugroho selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyediakan tesis ini
4. Dr. R. Widodo Triputro sebagai penguji I yang telah membantu penulisan dalam menyempurnakan tulisan ini.

5. Dr. Supardal, M.Si sebagai penguji II yang telah membantu penulisan dalam menyempurnakan tulisan ini.
 6. Kepada para dosen serta segenap pengelola Magister ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman
 7. H. Parja S.T., M.Si selaku Lurah Bangunjiwo dan jajaran Pamong Kalurahan, Pokdarwis, Pengurus Desa Wisata Kajigelem dan tokoh masyarakat di Kalurahan Bangunjiwo yang telah memberikan kesempatan dalam penelitian
- Dengan demikian semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang mempergunakannya.

Yogyakarta, 14 Januari 2022
Penulis

Sinta Apriyani

INTISARI

Dalam mengembangkan Desa Wisata Kajigelem di Kalurahan Bangunjiwo ada permasalahan yang pertama adanya kesenjangan dari ke empat desa wisata, kedua belum meratanya jumlah pengunjung, ketiga ketidak berdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang tersedia. Yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Kalurahan Bangunjiwo dan kendala yang dihadapi dalam tahap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan kendala dalam pemberdayaan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif, dengan objek penelitian pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Kajigelem dan kendala-kendalanya. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara sebanyak sepuluh informan, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan adalah purposive, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan desa wisata menjadi cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memberdayakan masyarakatnya melalui usaha kerajinan di Kalurahan Bangunjiwo. Di Kalurahan Bangunjiwo sendiri memiliki empat desa wisata yang mempunyai usaha kerajinan yang beragam, mulai dari Kasongan dengan industri kerajinan gerabah/keramik, Jipangan dengan industri kerajinan kipas bambu, Gendeng dengan industri kerajinan tatah singah kulit (wayang), dan Lemahdadi dengan sentra kerajinan patung batu. Dengan keberagaman hasil industri tersebut maka pemerintah membangun desa wisata kajigelem yang terpusat di daerah Sekar Mataram/Sekar Petak. Dari pengembangan desa wisata tersebut pemerintah desa dapat memberdayakan para pengrajin maupun masyarakat di Kalurahan Bangunjiwo. (1) Pada tahap penyadaran, masyarakat terlibat dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kalurahan melalui ketua RT/Pedukuhan yang ada di Kalurahan Bangunjiwo khususnya pedukuhan yang memiliki sentra kerajinan. (2) Pada tahap peningkatan kemampuan, masyarakat/pelaku wisata ikut berpartisipasi dalam peningkatan kemampuan dengan ikut berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah berupa pelatihan pengelolaan administrasi dan pengetahuan tentang manajemen pemasaran. (3) Pada tahap peningkatan kemampuan intelektual, masyarakat telah terlibat dalam kegiatan yang ada di Desa Wisata Kajigelem dan dari beberapa hasil kerajinan yang dihasilkan masyarakat ditampilkan untuk menarik para wisatawan yang berkunjung. Dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut juga terkendala pada terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, sehingga sampai saat ini hasil kerajinan belum banyak ditampilkan di Desa Wisata Kajigelem tersebut.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wisata

ABSTRACT

In developing the Kajigelem Tourism Village in Bangunjiwo Village, there are problems. First, there is a gap between the four tourist villages, the second is the unequal number of visitors, and the third is the powerlessness of the community to take advantage of the available potential. The focus of this research is how to empower the community through the development of tourism villages in Bangunjiwo Village and the obstacles faced in the community empowerment stage. This study aims to describe community empowerment through the development of tourist villages and obstacles in community empowerment.

The research method used is descriptive-qualitative, with the object of research being community empowerment through the development of the Kajigelem tourist village and its constraints. The data collection technique is through observation, interviews with ten informants, and documentation. The information selection technique is purposive, and the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing

The results in this study indicate that the development of tourist villages is a way for the government to empower its people through handicraft businesses in the Bangunjiwo Village. The village of Bangunjiwo itself has four tourist villages that have various craft businesses, ranging from Kasongan with the pottery/ceramic craft industry, Jipangan with the bamboo fan craft industry, Gendeng with the tatah singah kulit (puppet) craft industry, and Lemahdadi with the stone sculpture craft center. . With the diversity of industrial products, the government built a Kajigelem tourist village centered in the Sekar Mataram/Sekar Petak area. From the development of the tourist village, the village government can empower the craftsmen and the community in the Bangunjiwo Village. (1) At the awareness stage, the community is involved in the form of socialization carried out by the village government through the head of the RT/hamlet in Bangunjiwo village, especially the hamlet which has a craft center. (2) At the capacity building stage, the community/tourist actors participate in capacity building by participating in training organized by the government in the form of administrative management training and knowledge of marketing management. (3) At the stage of improving intellectual abilities, the community has been involved in activities in the Kajigelem Tourism Village and some of the handicrafts produced by the community are displayed to attract visiting tourists. The community empowerment process is also constrained by the limited budget owned by the Bangunjiwo Village Government, so that until now the handicrafts have not been widely displayed in the Kajigelem Tourism Village.

Keywords: Community Empowerment, Tourist Village

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang kemiskinan merupakan permasalahan yang kerap ditemui pada banyak negara seperti Indonesia. Berbagai strategi untuk pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi beras untuk masyarakat miskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan lain sebagainya. Program yang telah dijalankan oleh pemerintah tersebut tidak lain untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan yang ada di kota maupun di desa. Akan tetapi permasalahan kemiskinan bukan hal yang sederhana, terbukti hingga saat ini pemerintah terus mengupayakan berbagai cara untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat bisa mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 Kelurahan Bangunjiwo, yang terletak di Kapanewon Kasihan dengan jumlah masyarakat penerima bantuan PKH sebagai berikut:

Tabel I. 1 Penerimaan Program Keluarga Harapan

No	Kalurahan	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Bangunjiwo	1.412
2.	Tirtonirmolo	1.072
3.	Tamantirto	865
4.	Ngestiharjo	838
Jumlah		4.187

Sumber: Badan Pusat Stastistik Kecamatan Kasihan 2021

Dari data tersebut jumlah paling banyak penerima Program Keluarga harapan (PKH) yaitu di Kalurahan Bangunjiwo. Di Kalurahan Bangunjiwo jumlah Program Keluarga Harapan mencapai 1.412 kepala keluarga, dan selanjutnya Kalurahan Tirtonirmolo sebanyak 1.072 kepala keluarga, Kalurahan Tamantirto sebanyak 865 kepala keluarga dan Kalurahan Ngestiharjo sebanyak 838 kepala keluarga. Maka dari itu perlu adanya kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi jumlah kemiskinan tersebut.

Menurut Safri Miradj, Sumarmo dalam Riyanto (2018:2-3) persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada dimensi sosial, budaya, politik, pendidikan, bahkan juga sampai pada tingkat ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidak mampuan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya. Kemiskinan juga diakibatkan dari kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam memaknai pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan kawah candradimuka dalam menciptakan manusia yang cerdas dan berkualitas, sehingga dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi, politik, sosial dan budaya demi kemajuan bangsa. Didalam teori konsep pembangunan, bahwa suatu daerah itu dapat dikatakan maju apabila pendidikan itu maju dan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dengan daerah lain, salah satunya adalah dengan jalur pendidikan.

Pemanfaatan potensi alam yang tersedia bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk terhindar dari belenggu kemiskinan mapuan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Keberagaman Sumber Daya Alam (SDA) dinilai mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi bisa menjadi pekerjaan utama. Mengingat di era globalisasi saat ini setiap individu baik yang ada di kota/desa dituntut mampu terhadap tantangan untuk terus bersaing dalam perkembangan zaman. Pemanfaatan potensi alam yang ada di desa bisa dilakukan dengan pengelolaan di bidang pariwisata seperti contohnya pengembangan Desa Wisata. Dari hal tersebut masyarakat khususnya di desa bisa memanfaatkan potensi yang ada di desa kerana masyarakat desa kental dengan masyarakat yang menyatu dengan alam sekitar.

Sejalan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata pasal 12 ayat 2 kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pernyataan ini partisipasi masyarakat bisa

dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di sektor pemerintahan daerah hingga pemerintahan desa. Dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 18 desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam dua Peraturan Perundang-Undangan tersebut ada kaitannya antara pariwisata desa melalui pengembangan desa wisata dengan kewenangan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata dalam pengembangan desa wisata sangat diperlukan, karena pada era reformasi ini keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai pengikut pemerintahan dalam suatu kegiatan, akan tetapi suatu kegiatan dianggap berhasil jika melibatkan masyarakat dari tahapan penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual

Pengembangan desa wisata bisa menjadi salah satu jalan alternatif untuk tetap mengambangkan potensi yang ada di desa, guna mendorong pengembangan perekonomian dan pembangunan di pedesaan menuju kualitas yang lebih baik. Dengan adanya pengembangan tersebut diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat dan menambah pendapatan daerah dari pemanfaatan potensi yang ada di desa. Menurut Widyaningsih (2019:2) pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor yaitu, pertama

lingkungan pedesaan memiliki potensi alam yang masih alami dan masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi budaya. Kedua, lingkungan pedesaan masih asli belum tercemar oleh ragam jenis polusi seperti di perkotaan. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan. Dari hal tersebut pengembangan desa wisata bisa menjadi jalan keluar untuk tetap memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang tersedia di berbagai desa.

Pengembangan pada sektor pariwisata saat sekarang ini sedang menjadi program prioritas Kabupaten Bantul. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah maupun bagi pengelola tempat wisata (masyarakat). Pernyataan tersebut bisa dilihat dari RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 mengidentifikasi permasalahan pada sektor pariwisata diantaranya yaitu (1) manajemen pengelolaan pariwisata yang belum optimal, (2) kualitas sarana prasarana pariwisata belum optimal (3). Inovasi atraksi dan tempat pilihan wisata lemah (4). Strategi pengembangan objek wisata (5) besaran kunjungan yang tidak merata. Dari pernyataan tersebut pemerintah sebagai fasilitator harus mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mendayagunakan masyarakat bisa dijadikan jalan keluar dalam sektor pariwisata di Kabupaten Bantul.

Menurut Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 terdapat 141 desa wisata yang berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul. Di Kabupaten Bantul sendiri ada sebanyak 43 desa wisata yang sedang dikembangkan seperti, Desa Wisata Kajigelem Di Bangunjiwo, Desa Wisata Wukirsari di Imogiri, Desa Wisata Kreet, Desa Wisata Kampung Santan, Desa Wisata Manding dan lain sebagainya. Dalam pengembangan desa wisata tersebut setiap desa memiliki potensi unggulan untuk dijadikan prioritas pariwisata. Di setiap desa wisata tersebut terdapat karakteristik tersendiri di bandingkan dengan desa wisata yang lainnya.

Letak Desa Wisata yang berada di pinggiran kota menjadi faktor penting untuk dijangkau oleh para wisatawan untuk berwisata di Kajigelem. Kajigelem merupakan singkatan dari KA= Kasongan merupakan sentra industri kerajinan gerabah/keramik. JI= Jipangan merupakan desa wisata yang dijadikan suatu kawasan sentra kerajinan kipas bambu, wisata edukasi dan wisata budaya. GE= Gendeng yang merupakan sentra kerajinan tatah singah kulit (wayang). Dan LEM= Lemahdadi yang merupakan sentra kerajinan patung batu (patah dan cetak).

Dalam observasi awal, peneliti melihat permasalahan yang ada di Desa Wisata Kajigelem. Meninggkat di Kalurahan Bangunjiwo menjadi kawasan desa wisata terpadu dengan unggulan budaya lokal (kerajinan gerabah, kipas bambu, potensi alam, ukir kulit, dan patah batu) akan tetapi Desa Wisata Kasongan dengan sentra kerajinan gerabah yang diminati oleh para

wisatawan yang berkunjung. Dengan demikian kunjungan wisatawan hanya terpusat di Desa Wisata Kasongan saja/belum meratanya jumlah pengunjung. Ketidak berdayaan masyarakat tersebut dapat dipengaruhi dari ketidak mampuan masyarakat dan tingkat pendidikan yang rendah untuk memanfaatkan potensi yang tersedia di Kalurahan Bangunjiwo. Pemberdayaan masyarakat juga terpusat pada Desa Wisata Kasongan karena dengan banyaknya kunjungan wisatawan maka membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan kegiatan Desa Wisata tersebut. Maka dari itu, tiga desa wisata lainnya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat sendiri dan pemerintah desa.

Dengan permasalahan yang ada di Desa Wisata tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut. Dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk memberdayakan masyarakat khususnya melalui pengembangan desa wisata. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Bangunjiwo.

Dalam penelitian ini tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata bukanlah satu-satunya penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa peneliti lain yang telah melakukan penelitian sebidang, antara lain:

Penelitian sebidang yang pertama pernah dilakukan oleh Riyanto (2018) yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Industri Keraajinan Patung Batu Di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan*

Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Thesis Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu di Pedukuhan Lemahdadi Desa Bangunjiwo dijadikan sentra kerajinan patung batu yang telah terkenal hingga ke manca negara. Dengan bekal pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki, masyarakat Lemahdadi mencoba untuk terus meningkatkan ekonomi dengan bekerja sebagai pengrajin patung batu. Pemberdayaan masyarakat di desa tersebut sudah terjalin dengan baik di setiap kelompok pengrajin patung batu, dimana masyarakat yang ada bersifat agraris menjadi masyarakat industrialis.. Keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari pemerintah desa yang terus diupayakan samapai saat sekarang ini.

Penelitian yang ke dua dilakukan oleh Hary Hermawan (2016) yang berjudul *Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Yogyakarta (diakses <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/1383>) . Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya, Desa Nglanggeran dinilai cukup berhasil dengan indikator utamanya yaitu kenaikan kunjungan wisatawan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran tidak terlepas dari kualitas pendidikan, kesiapan masyarakat serta keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata bisa

membuka peluang kerja/usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal bahkan pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata

Penelitian yang ke tiga dari Ingga Purwanti (2019) yang berjudul *Strategi Kelompok Sadar Wisata Dalam Penguatan Desa Wisata*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang (diakses <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1792>) .

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitiannya yaitu desa wisata (kampung wisata kungkuk) dilaksanakan melalui strategi inovatif yang dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah atau tindakan untuk jangka waktu tertentu. Untuk menjalankan kegiatan yang berada di Kampung Kungkuk, kelompok sadar wisata melakukan promosi wisata melalui media elektronik, kelompok PKK, dan karang taruna. Dengan cara tersebut mampu mendatangkan wisatawan dari luar daerah untuk berkeunjung ke Desa Wisata Kungkuk sehingga berdampak terhadap pendapatan masyarakat.

Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengembangkan potensi yang tersedia di masing-masing desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi juga terdapat perbedaan antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut dilihat dari proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh peneliti sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya fokus pada usaha kerajinan patung batu, dampak dari desa wisata dan strategi pokdarwis dalam penguatan desa

wisata. Sedangkan penelitian ini fokus pada tahapan dan kendala dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan topik penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, maka yang menjadi fokus penelitiannya pada:

1. Tahapan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahapan penyadaran
 - b. Tahapan transformasi kemampuan
 - c. Tahapan peningkatan kemampuan intelektual
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam tiap tahap pemberdayaan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada tesis ini yaitu:

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Kalurahan Bangunjiwo?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam tiap pemberdayaan masyarakat?

D. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui hambatan/kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

E. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis: dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata
2. Manfaat Praktis: dapat memberikan manfaat bagi kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

F. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan Desa

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat

Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat

Desa. Kewenangan Desa sendiri meliputi:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomer 1 Tahun 2015, Pasal 13 dijelaskan bahwa kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud yaitu:

- 1) Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa
- 2) Membina kerukunan warga masyarakat Desa
- 3) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa
- 4) Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Lebih lanjut lagi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomer 1 Tahun 2015, pasal 14 dijelaskan

kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat meliputi:

- 1) Pengembangan seni budaya lokal
- 2) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
- 3) Fasilitas kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - a. Kelompok tani
 - b. Kelompok nelayan
 - c. Kelompok seni budaya
 - d. Kelompok masyarakat lain di Desa
- 4) Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin
- 5) Fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel
- 6) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa
- 7) Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa
- 8) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- 9) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- 10) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa
- 11) Pendayagunaan teknologi tepat guna, dan
- 12) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:

- a. Kader pemberdayaan masyarakat Desa
- b. Kelompok usaha ekonomi produktif
- c. Kelompok perempuan
- d. Kelompok tani
- e. Kelompok masyarakat miskin
- f. Kelompok nelayan kelompok pengrajin
- g. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
- h. Kelompok pemuda
- i. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Dedeh Maryani dan Nainggolan (2019:1) pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “daya” merupakan kata dasar dan tambahan awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan.

Sedangkan menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Santoso (2019:33) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pengembangan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu *people centered, participatory, empowering and sustainable*. Konsep ini sebenarnya lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan suatu kelompok/masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

3. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Chabub Saleh (2014:81) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mempunyai berbagai tahapan antara lain:

- 1) Penumbuhan hasrat atau keinginan mau berubah

Langkah awal proses pemberdayaan adalah bagaimana menimbulkan untuk berubah. Tanpa keinginan dari yang bersangkutan proses pemberdayaan apapun akan menemui kendala jika tidak tumbuh keinginan berubah kearah yang lebih baik.

- 2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian

Menumbuhkan minat, kemauan untuk menahan diri dari kesenangan sesaat dengan keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan untuk selanjutnya mengambil keputusan untuk keluar dari belenggu kemiskinan merupakan tahapan yang sangat penting.

3) Mengembangkan kemauan dan ambil bagian

Tumbuhnya kemampuan minat dan keberanian untuk secara sadar melakukan perubahan nasib memperbaiki mutu kehidupan akan mendorong yang bersangkutan untuk secara sadar tanpa adanya paksaan untuk ikut serta mengambil bagian dalam setiap kesempatan yang memungkinkan akan memperbaiki setiap kegiatan.

4) Peningkatan peran dalam setiap kegiatan

Keterampilan secara sadar terhadap suatu kegiatan dalam proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka telah merasakan manfaat (ekonomi dan sosial). Ada baiknya bagi para pelaku pemberdayaan untuk mempertemukan mereka dengan orang yang telah berhasil mandiri untuk saling berbagi pengalaman tentang suka dan duka mereka dalam pemberdayaan.

5) Peningkatan efisiensi dan efektifitas

Sebagaimana kita ketahui setiap manusia memiliki tujuan yang tidak terbatas, sementara sumber daya untuk mewujudkan tujuan tersebut sangat terbatas. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya yang terbatas itu harus dilakukan dengan seefisien mungkin. Hal tersebut

mengisyaraktakan akan pentingnya suatu metode atau teknologi yang tepat agar sumber daya yang ada dapat dihemat secara otomatis.

6) Peningkatan kompetensi diri secara otomatis

Pada akhirnya pemberdayaan harus mampu meningkatkan kapasitas diri secara otomatis pada pihak yang diberdayakan. Hal ini dapat terjadi apabila mereka sudah merasakan manfaat langsung maupun tidak langsung yaitu berupa peningkatan kapasitas diri yang diperoleh secara otomatis baik dari belajar pada pengalaman yang telah mereka rasakan.

Sedangkan menurut Sugartini, dkk dalam Budhi Baihakki (2016:45) ada beberapa tahapan yang seharusnya dilalui dalam melakukan pemberdayaan antara lain:

- 1) Membantu masyarakat dalam menentukan masalahnya.
- 2) Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (partisipatif).
- 3) Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilih dan memilah tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
- 4) Mencari cara penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan cara sosial kultural yang ada di masyarakat.
- 5) Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- 6) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk menilai sejauh mana keberhasilan kegagalannya.

Lebih lanjut lagi menurut Sumarno dalam Riyanto (2018:15) mengemukakan tahap-tahap yang harus dilalui dalam rangka proses pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu:

- 1). Tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku, menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2). Tahapan transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecukupan keterampilan agar terbuka wawasan pengetahuan, kecukupan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pengembangan.
- 3). Tahapan peningkatan kemampuan intelektual, kecukupan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Berdasarkan penjelasan mengenai tahapan-tahapan diatas tersebut, maka pemberdayaan masyarakat atau *empowerment* dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok melalui pendampingan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Sehingga masyarakat tersebut bisa melalui berbagai tahapan seperti penyadaran, pengaplikasian hingga pendayagunaan untuk mengelola potensi sumber daya yang tersedia tanpa adanya kendala yang akan dihadapi.

4. Desa Wisata

Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Tentang Pedoman Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata, mengemukakan desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku

Menurut Hadiwijoyo dalam Ni Wayan Giri Adnyani (2019:8) desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang yang khas, atau kegiatan ekonomi yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan seperti atraksi desa, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.

Menurut Priasukmana & Mulyadin (2013:38) desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan dari suasana yang mencerminkan keaslian dari pedesaan itu sendiri mulai dari sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas dan dari kehidupan sosial ekonomi atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya sebagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan

kebutuhan wisata lainnya. Dalam pengembangan desa wisata ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

- 1). Aksesibilitas baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- 2). Memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata.
- 3). Masyarakat dan aparat desa memberi dukungan yang tinggi terhadap pengembangan desa wisata, serta para wisatawan yang datang.
- 4). Keamanan di desa tersebut terjamin
- 5). Tersedianya akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai
- 6). Beriklim sejuk dan dingin
- 7). Berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah terkenal oleh masyarakat luas.

Sedangkan menurut Puan Maharani, dkk (2019:1) desa wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas berupa keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat pedesaan dengan segala potensinya. Desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria:

- 1). Memiliki potensi daya tarik wisata (daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/karya kreatif)
- 2). Memiliki komunitas masyarakat

- 3). Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktifitas pengembangan desa wisata
- 4). Memiliki kelembagaan pengelolaan
- 5). Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata.
- 6). Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomer 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 pada pasal 6 tentang tujuan pengembangan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. Mewujudkan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah
- b. Mewujudkan kawasan Daerah bagian Selatan sebagai kawasan baru pariwisata yang berorientasi pada nilai strategis Samudera Hindia;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan
- d. Meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan berbasis mitigasi bencana;

- e. Mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- f. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerja sama antar usaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. Mengembangkan lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Dari Tujuan Pengembangan Kepariwisataan Tersebut Bisa Dilihat Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul membuat arah tujuan pariwisata yang berada di daerahnya. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah dan masyarakat bisa membuat kegiatan berwisata salah satunya yaitu dengan pengembangan desa wisata.

Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomer 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dijelaskan bahwa pengembangan destinasi pariwisata bisa sektor strategis di Kabupaten Bantul, pengembangan destinasi pariwisata akan tetap menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dikarenakan dalam

atau *multiflier effect* nya terhadap akselerasi perekonomian dengan sangat positif, antara lain penyediaan lapangan usaha, pemberdayaan masyarakat, pengembangan wilayah dan pertumbuhan industri pariwisata serta kontribusi dalam bentuk PAD terhadap Pemerintah Daerah. Pengembangan destinasi pariwisata difokuskan pada pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Peningkatan daya tarik serta pelayanan pariwisata. Dalam peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk suatu kawasan strategis sosial - kultur yang meliputi kawasan strategis Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan-Manding-Tembi (GMT)) dan Kasongan - Jipangan - Gendeng- Lemahdadi (Kajigelem). Dengan pembentukan kawasan strategis tersebut Pemerintah Daerah berharap bisa dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga dengan jalan tersebut masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan.

Dari penjelasan diatas, maka desa wisata merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki ciri khas tersendiri, adat-istiadat, sosial budaya, dan potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi wisata. Pembentukan desa wisata dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan aktif sebagai roda penggerak dalam upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tersedia di suatu pedesaan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Rahmawati Dian E

(2014:13) penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif, bisa berupa kata-kata maupun tulisan dari seseorang terhadap sesuatu yang sedang diamati di lapangan. Dengan penjelasan seperti itu maka penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami suatu fenomena secara historik dan tidak mengisolasi suatu individu ataupun organisasi ke dalam variabel atau hipotesis akan tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Dengan metode deskriptif kualitatif tersebut akan digunakan peneliti untuk penelitian yang berjudul Pengembangan Masyarakat Melalui Desa Wisata di Kalurahan Bangunjiwo

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Teknik Pemilihan Informan

Sumber data diperoleh dari informan saat terjun langsung ke lapangan tempat peneliti dilakukan. Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Beberapa informan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian. Informan sendiri merupakan orang yang dapat memberikan

informasi, sumber informasi dan sumber data serta orang yang juga terlibat langsung dalam fenomena yang akan diteliti. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive*. Menurut Sugiyono (2014:122) *purposive* yaitu suatu teknik penentuan informan yang dipilih dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang akan dikehendaki melalui wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian ini mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, maka pihak yang akan dijadikan subjek penelitian yaitu:

Tabel I. 2
Identitas Informan

No	Nama	Umur	Jabatan/Pekerjaan	Pendidikan
1	Parja, S. T M.Si	51 tahun	Lurah Desa Bangunjiwo	S2
2	Andoyo	54 Tahun	Kepala Seksi Kesejahteraan	SMA
3	Sam	51 tahun	Pengurus Desa Wisata Kajigelem	SMA
4	Ponidi, SE	59 tahun	Pengurus Desa Wisata Kajigelem	S1
5	Siyam Hadi Wiguno	59 tahun	Pengurus Pokdarwis	SMA
6	Dermawan	47 tahun	Tokoh Masyarakat	S1
7	Ida	31 tahun	Pelaku Wisata	SMA
8	Jumiati	47 tahun	Pelaku Wisata	SMA
9	Zaidi	34 Tahun	Wisatawan	SMA
10	Anton	21 tahun	Wisatawan	SMA

Sumber : Data Primer

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data bisa dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1). Observasi

Menurut Rahmawati Dian E (2014:31) observasi adalah cara pengumpulan data mengenai konsep penelitian di dalam unit analisis penelitian, yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti melakukan kegiatan pengamatan dan pencatatan tentang kegiatan desa wisata di Kalurahan Bangunjiwo.

2). Wawancara

Menurut Ahmad Tanzen (2011:89) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Untuk mencari informasi yang diinginkan, peneliti mewawancarai: pertama Lurah Desa Bangunjiwo tentang pemberdayaan masyarakat dalam Desa Wisata Kajigelem. Kedua, Kepala seksi Kesejahteraan tentang pemberdayaan masyarakat dalam Desa Wisata Kajigelem. Ketiga, pengurus Desa Wisata Kajigelem tentang kegiatan di Desa Wisata. Keempat pengurus pokdarwis tentang pengerak kegiatan desa wisata. Kelima, tokoh masyarakat tentang dampak dari kegiatan desa wisata. Keenam, pelaku wisata tentang keterlibatan dalam kegiatan desa wisata. Dan yang terakhir wisatawan tentang kegiatan wisata yang dapat di nikmati.

3). Dokumentasi

Menurut Rahmawati Dian E (2014:33) dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan berbagai macam dokumen atau catatan yang bisa menjelaskan keadaan konsep yang sedang diteliti, di dalam unit analisis yang selanjutnya akan digunakan menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan informasi peneliti menggunakan dokumen-dokumen dari Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, berita online, dan dokumen yang menunjang penelitian.

6. Teknik Analisis data

Menurut Miles dan Huberman dalam Yusuf, M. A 2014:407) dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti *interview*, observasi, kutipan, dan dokumen. Karena itu, data tersebut di “proses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Dalam teknik yang dipakai untuk menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai selesai

Dalam jenis penelitian kualitatif hanya bisa dilakukan secara terus menerus sehingga bisa mendapatkan sebuah data yang diinginkan. Aktifitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1). Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang dianggap penting, menfokuskan pada suatu tujuan, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memperoleh penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2). Penyajian data (data display)

Dalam melakukan penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antara kategori *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang sedang difahami tersebut.

3). Pengambilan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah seiring waktu, bila ditemukam bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan awal didukung dengan data yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berbeda dilapangan.

BAB II

PROFIL KALURAHAN BANGUNJIWO

Dalam bab II ini berisi tentang gambaran Kalurahan Bangunjiwo : A. Profil Kalurahan Bangunjiwo yang meliputi (1) Sejarah Kalurahan Bangunjiwo (2) Kondisi Geografis (3) Kondisi Demografis. Sedangkan yang bagian B. Profil Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo, yang meliputi (1) Visi dan Misi (2) Struktur Organisasi (3) Tugas Pokok (4) Lembaga Kalurahan Bangunjiwo. Dan yang terakhir C. Profil Desa Wisata Kalurahan Bangunjiwo.

A. Profil Kalurahan Bangunjiwo

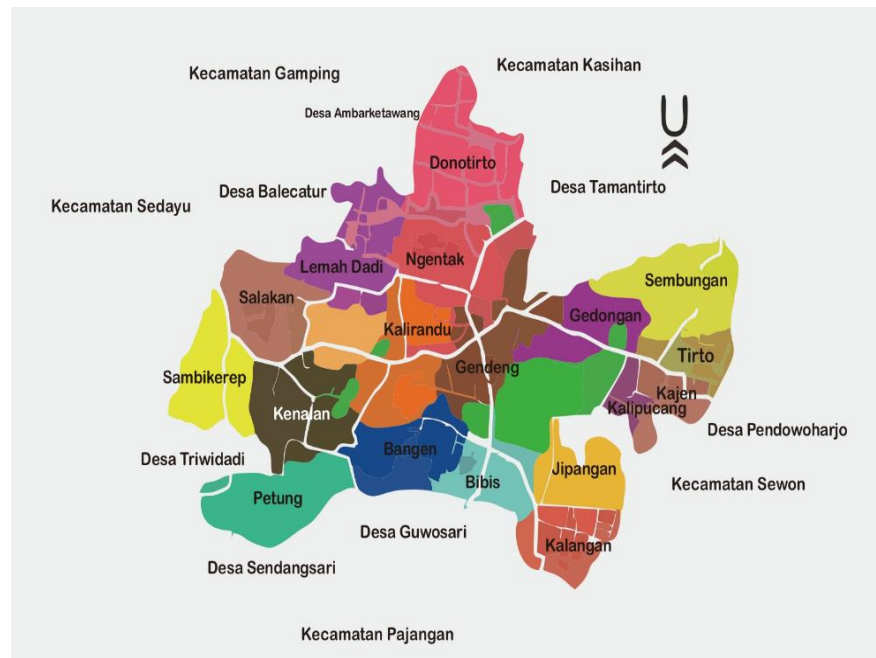
1. Sejarah Kalurahan Bangunjiwo

Pada awalnya Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul merupakan gabungan dari beberapa kalurahan yang ada pada tahun 1946 yaitu: Kalurahan Kasongan, Kalurahan Bangen, Kalurahan Sribitan, dan Kalurahan Paitan. Berdasarkan dengan Maklumat Jogjakarta Nomer 18 Tahun 1946 untuk diadakannya pertemuan atau rapat gabungan dari beberapa kalurahan untuk menjadi satu kalurahan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemajuan Kalurahan dalam mengatur rumah tangganya sendiri (menuju otonomi desa). Atas kesepakatan ke empat Kalurahan tersebut pada tanggal 7 Desember 1946 bergabung menjadi satu yaitu Kalurahan Bangunjiwo. Pada saat itu yang menjadi Lurah Desa merupakan mantan Carik Kalurahan Sribitan yaitu Bapak Sastro Sukarno.

2. Kondisi Geografis

Kalurahan Bangunjiwo merupakan salah satu dari empat kalurahan yang berada di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Jarak kalurahan ke kecamatan kurang lebih berjarak 4 KM, sedangkan jarak kalurahan ke kabupaten kurang lebih 8 KM, dan jarak kalurahan ke ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta kurang lebih 10 KM. Batas wilayah Kalurahan Bangunjiwo meliputi, sebelah utara Kalurahan Tamantirto, sebelah selatan Kalurahan Guwosari, sebelah barat Kalurahan Triwidadi, sebelah timur Kalurahan Tamantirto. Berikut ini merupakan peta Kalurahan Bangunjiwo:

Gambar II. 1 Wilayah Administratif Kalurahan Bangunjiwo



Sumber: Website Kalurahan Bangunjiwo, Tahun 2020

Dari tabel diatas di Kalurahan Bangunjiwo memiliki luas wilayah sebesar 1.453 Ha yang digunakan oleh masyarakat setempat sesuai kebutuhan hidup masing-masing. Di kalurahan Bangunjiwo terdiri dari 19

pedukuhan, 144 Rukun Tetangga dan mencapai 10.423 KK (Kepala Keluarga). Secara geografis wilayah di Kalurahan Bangunjiwo sebagian besar berada di pegunungan berkapur karena letaknya tidak jauh dari Goa Selarong. Berikut ini penggunaan lahan di Kalurahan bangunjiwo sebagai berikut:

Tabel II. 1
Lahan Pertanahan di Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	188 Ha
2.	Tanah Kering	857 Ha
3.	Tanah Basah	0 Ha
4.	Tanah Perkebunan	184 Ha
5.	Fasilitas Umum	76 Ha
6.	Tanah Hutan	236 Ha
	Total Jumlah	1.543 Ha

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo, Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa kawasan lahan produktif yaitu berupa lahan tanah persawahan, tanah kering, tanah basah, perkebunan, hutan, keempatnya merupakan lahan yang dapat diolah masyarakat karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Lahan tanah kering merupakan kawasan yang paling luas di Kalurahan Bangunjiwo yakni mencapai 857 Ha, diikuti dengan lahan tanah hutan yang mencapai 236 Ha, sedangkan lahan persawahan yang mencapai 188 Ha, dan yang terakhir yaitu lahan tanah perkebunan yang mencapai 76 Ha. Masyarakat setempat bisa memanfaatkan tanah yang berada di Kalurahan Bangunjiwo tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga dengan cara pemanfaatan lahan produktif tersebut bisa menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa.

Selain itu pemanfaatan lahan tersebut juga bisa digunakan dalam pengembangan desa wisata, mengingat Kalurahan Bangunjiwo merupakan kawasan strategis sosial-kultur yang meliputi kawasan Desa Wisata Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi (Kajigelem).

3. Kondisi Demografis

Berdasarkan data kependudukan di Kalurahan Bangunjiwo, jumlah kepala keluarga yaitu mencapai 10.432KK yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berikut ini rincian tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin:

Tabel II. 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2020

Jenis kelamin		Total Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
15.445	14.830	30.275

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo, Tahun 2020

Pada tabel diatas jumlah penduduk di Kalurahan Bangunjiwo mencapai 30.275 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 15.445 jiwa dan perempuan sebanyak 14.830 jiwa dengan jumlah kepala keluarga yaitu mencapai 10.423 KK. Dari jumlah penduduk tersebut mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Berikut ini rincian tabel tingkat pendidikan yaitu:

a. Pendidikan

Tabel II. 3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Pendidikan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	477	183	660
2.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	3612	3237	6.849
3.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	7	9	16
4.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	602	421	1.023
5.	Taman SMA/Sederajat	3167	2568	5.735
6.	Tamat D-1/Sederajat	357	426	783
7.	Tamat D-2/Sederajat	235	248	483
8.	Tamat D-3/Sederajat	331	437	768
9.	Tamat S-1/Sederajat	267	259	526
Total jumlah				17.254 Jiwa

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo, Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo cukup baik. Jumlah penduduk yang paling banyak yaitu tamatan SMA/Sederajat dengan total 5.735 jiwa yang terdiri dari laki-laki mencapai 3167 jiwa dan perempuan mencapai 2568 jiwa. Sedangkan tingkat pendidikan D-1 dengan total 783 jiwa yang terdiri dari laki-laki mencapai 357 jiwa dan perempuan mencapai 426 jiwa. Selanjutnya tamatan D-3/Sederajat total 768 jiwa dengan jumlah

laki-laki mencapai 331 jiwa dan perempuan 437 jiwa. Dan yang terakhir tamat S-1 dengan total 526 jiwa yang terdiri dari laki-laki mencapai 267 jiwa dan perempuan 259 jiwa. Dari jumlah penduduk menurut pendidikan di Kalurahan Bangunjiwo, dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup keluarga.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi juga harus diimbangi dengan suatu pemberdayaan masyarakat di tingkat desa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dari itu perlu adanya penguatan SDM guna mengembangkan potensi yang ada di Kalurahan Bangunjiwo seperti pengembangan Desa Wisata Kajigelem.

b. Agama

Tabel II. 4
Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2020

No	Agama	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	14.768	14.178	28.946
2.	Kristen	379	354	733
3.	Katholik	287	289	576
4.	Hindu	11	9	20
Total Jumlah				30.275

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo, Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kalurahan Bangunjiwo beragama Islam. Jumlah penduduk yang beragama Islam yaitu sebanyak 28.946 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14.768 jiwa dan perempuan sebanyak 14.178 jiwa. Kemudian

disusul penduduk beragama kristen dengan jumlah 733 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 379 jiwa dan perempuan berjumlah 354 jiwa. Sedangkan untuk penduduk beragama katolik berjumlah 576 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 287 jiwa dan perempuan berjumlah 289 jiwa. Dan yang terakhir penduduk yang beragama Hindu yakni berjumlah 20 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 11 jiwa sedangkan perempuannya berjumlah 9 jiwa. Jadi jumlah keseluruhan penduduk menurut agama sebesar 30.275 jiwa. Keberagaman dalam beragama yang ada di Kalurahan Bangunjiwo tentu saja membutuhkan peran pemerintah kalurahan dan masyarakat sendiri untuk menjaga keharmonisan antar penganut agama satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan menjaga komunikasi yang baik dan sikap saling toleran akan mewujudkan keharmonisan antar umat beragama khususnya di Kalurahan Bangunjiwo.

c. Mata pencaharian

Tabel II. 5
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian yang Mendukung
Desa Wisata Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Petani/buruh tani	1.442	844	2.286
2	Karyawan swasta/PNS/TNI/Polri	752	529	1.281
3	Pengusaha kecil, menengah dan besar	107	52	159
4	Tukang kayu/batu	2.679	0	2.679
5	Pengerajin	617	648	1.265
6	Artsitektur/desainer	7	9	16
7	Seniman	7	5	12
8	Pembantu rumah tangga	0	75	75
9	Notaris	2	0	2
10	Peternak	229	141	370
11	Pedagang kelontong	531	759	1.290
12	Buruh harian lepas	2.114	2.049	4.163
Total Jumlah				12.777 jiwa

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo, Tahun 2020

Dari data diatas terlihat bahwa Kalurahan Bangunjiwo merupakan kalurahan dengan tingkat masyarakat yang cukup produktif dan terampil. Dengan jumlah mata pencaharian masyarakat yang beragam dan sebagian besar terdiri dari petani, tukang kayu/batu, pengrajin dan buruh lepas. Berkembangnya berbagai industri kerajinan di Kalurahan Bangunjiwo begitu menentukan jenis pekerjaan yang ada

di sana. Keberadaan Desa Wisata Kajigelem yang terdapat di empat pedukuhan sangat menyerap tenaga kerja khususnya bagi masyarakat sekitar. Bisa dilihat jumlah pengrajin yang ada di kalurahan tersebut mencapai 1.265 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 617 jiwa dan perempuannya sebanyak 648 jiwa. Selain itu berkembangnya sentra kerajinan gerabah/keramik di Kasongan dan sentra kerajinan patung batu di Lemahdadi bisa menyerap pekerja. Jumlah pekerja laki-laki yang terlibat disana mencapai 2.679 jiwa. Dengan keberadaan Desa Wisata Kajigelem mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Oleh karena itu, peran serta pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di Kalurahan Bangunjiwo sangat dibutuhkan. Sehingga kedepannya pengembangan Desa Wisata Kajigelem bisa menyerap tenaga kerja yang lebih berkualitas dan bisa bersaing dengan tempat wisata yang lainnya yang sudah berkembang lebih dulu.

d. Tenaga kerja

Tabel II. 6
Jumlah Penduduk Menurut Tenaga Kerja Tahun 2020

No	Tenaga Kerja	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (Jiwa)
2	Penduduk masih sekolah 7-18 tahun bekerja/belum bekerja	3.813	3.537	7.350
3	Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	7.883	7.851	15.734
4	Penduduk usia 18-56 tahun yang belum/tidak bekerja	159	211	370
5	Penduduk usia 56 tahun keatas yang bekerja	1.419	1.540	2.959
Total Jumlah				26.413

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo, Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kalurahan Bangunjiwo merupakan kalurahan yang cukup produktif. Dengan jumlah penduduk 18-56 tahun yang bekerja laki-laki sebanyak 7.883 jiwa dan perempuan sebanyak 7.851 jiwa dengan jumlah keseluruhan mencapai 15.734 jiwa. Sedangkan penduduk usia 18-56 tahun yang belum/tidak bekerja sebanyak 159 jiwa dan perempuannya sebanyak 211 jiwa dengan jumlah secara keseluruhan mencapai 370 jiwa. Dan penduduk usia 56 tahun keatas yang bekerja sebanyak 1.419 jiwa untuk laki-laki sedangkan perempuan sebanyak 1.540 jiwa dengan total secara

keseluruhan mencapai 2.959 jiwa. Dari pernyataan tersebut masih perlu peningkatan keterampilan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di Kalurahan tersebut salah satunya melalui pengembangan desa wisata. Sehingga dengan memberdayakan masyarakat setempat bisa membuka tenaga kerja yang berkualitas dan berpengaruh dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Kajigelem.

B. Profil Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo

1. Visi dan Misi

a. Visi

Bangunjiwo yang maju dalam bingkai nilai-nilai tradisi yang kuat.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam pengembangan fisik maupun non fisik.
- 3) Memasyarakatkan nilai demokrasi
- 4) Melestarikan budaya dan nilai tradisi yang kuat
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dilihat dari misi diatas kaitannya dengan kegiatan desa wisata seperti pada penelitian ini. Dalam pengembangan desa wisata bisa termuat dalam misi diantaranya yaitu (1). Melestarikan budaya dan nilai tradisi yang kuat dan yang ke

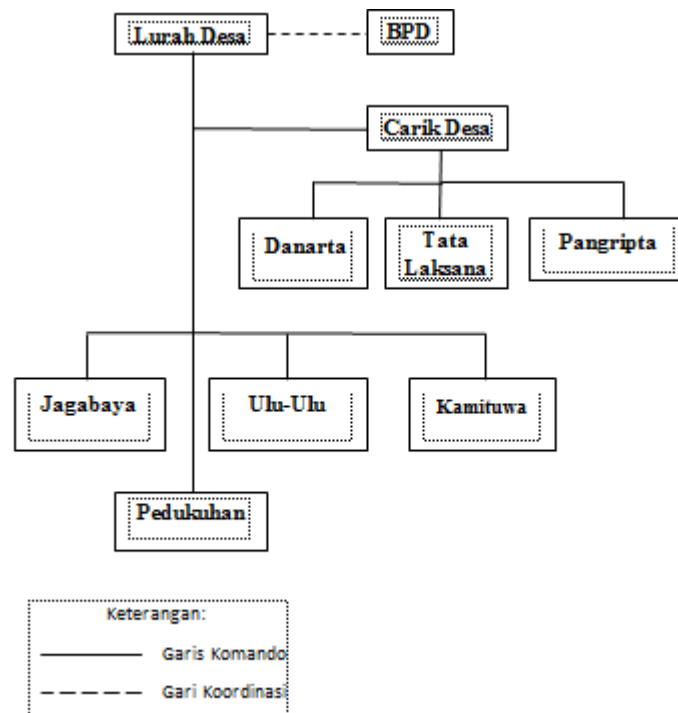
(2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari kedua misi tersebut pemerintah bisa mengimplementasikan ke dalam kegiatan desa wisata.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo sebagai berikut:

Gambar II. 2

Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo



Sumber: Dokumen Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo

3. Tugas Pokok

Berdasarkan pada Peraturan Desa (PERDES) Bangunjiwo Nomer 06 tahun 2015 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo maka tugas pokok dari masing-masing jabatan di Kalurahan Bangunjiwo adalah sebagai berikut:

a. Lurah/Kepala Desa

Lurah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakukan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas Lurah Desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pamong desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- 4) Menetapkan peraturan desa
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 9) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 10) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa
- 11) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- 13) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

b. Sekertaris Desa/Carik

Sekertaris Desa/Carik membantu tugas kepala desa untuk menjalankan pemerintahan. Sekertaris desa/Carik mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintahan Desa
- 2) Pengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan pelaksanaan kewajiban
- 3) Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4) Menyelenggarakan kesekretariatan desa
- 5) Menjalankan administrasi desa
- 6) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa
- 7) Melaksanakan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik Pemerintah Desa
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa

c. Danarta

Danarta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDesa
- 2) Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Lurah Desa
- 3) Mengendalikan pelaksanaan APBDes
- 4) Mengelola dan membina administrasi keuangan desa
- 5) Mengali sumber pendapatan desa

d. Tata Laksana

Tata Laksana mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan urusan surat menyurat
- 2) Melakukan pengelolaan arsip Pemerintahan Desa
- 3) Melaksanakan pengelolaan barang inventaris desa
- 4) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa
- 5) Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan upacara serta kegiatan di Pemerintah Desa.

e. Pangripta

Pangripta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah desa
- 2) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja Pemerintahan desa secara rutin dan berkala
- 3) Melaksanakan musrembang desa
- 4) Menyusun RPJMDes
- 5) Menyusun RKPDes.

f. Jagabaya

Kepala seksi pemerintaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- 2) Melaksanakan administrasi kependudukan

- 3) Melaksanakan pembinaan sosial politik
- 4) Memfasilitasi kerja sama pemerintah desa.

g. Ulu-Ulu

Ulu-Ulu mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- 2) Penyusun rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, dan kegiatan pembinaan sosial politik, pelaporan dan pertanggung jawaban perencanaan dan pelaksanaan
- 3) Penyelesaian perselisihan warga.

h. Kamituwa

Kamituwa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa
- 2) Mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya
- 4) Mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga.

4. Lembaga Desa Bangunjiwo

Proses pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Bangunjiwo selain dilakukan oleh Pemerintah Desa juga didukung oleh beberapa lembaga terkait yang ada di desa tersebut, antara lain:

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

LPMD sangat berperan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Bangunjiwo karena lembaga tersebut yang langsung melaksanakan kegiatan atas program-program yang di rancang oleh Pemerintah Kalurahan. LPMD di tingkat Kalurahan mempunyai peran penting dalam proses pelaksanaan program di tingkat kalurahan dan mempunyai sub unit di masing-masing pedukuhan untuk membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sub unit di tingkat pedukuhan yang dimaksud merupakan Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pokgiatan LMPD). LPMD di tingkat Kalurahan Bangunjiwo beranggotakan 19 orang di ambil dari perwakilan si masing-masing pedukuhan.

Kelompok pokgiat LPMD mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan kepada setiap lembaga yang ada di pedukuhan dan melaksanakan program secara umum, dengan anggota yang terdiri dari ketua Rukun Tetangga (RT) sekertaris RT, ketua PKK, Ketua Posyandu Balita, ketua Posyandu lanjut usia ketua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan karangtaruna di masing-masing pedukuhan. Berikut ini merupakan kepengurusan LPMD Kalurahan Bangunjiwo tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel II. 7
Lambaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kalurahan
Bangunjiwo

No	Nama	Jabatan
1	Widada, M.Pd Suparwondo, S.Sn	Ketua I Ketua II
2	Purwoko Wasiyem, S.E	Sekretaris I Sekretaris II
3	Sriyono Karsono	Bendahara I Bendahara II
4	Purjiman Sutahir	Seksi Pembangunan
5	Waginim Abdul Wahap	Seksi Pemberdayaan Ekonomi
6	Parjo Hartono	Seksi Sosial Budaya
7	Samadi Sumari	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
8	Mugiyanto	Seksi Kesehatan dan Lingkungan
9	H.Riyoko H. Muhidayat	Seksi Kerohanian
10	Sariyo	Seksi Humas dan Informasi

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo, Tahun 2020

b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan juga merupakan pelaksanaan kegiatan yang paling dominan baik ditingkat kalurahan maupun tingkat pedukuhan. PKK mengampu beberapa program pelaksanaan kegiatan pemberdayaan khususnya masyarakat, antara lain kegiatan Posyandu balita dan lansia, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan dasa wisma. Keanggotaan PKK yang ada di tingkat kalurahan terdiri dari istri Lurah dan istri perangkat Kalurahan Bangunjiwo, sedangkan

keanggotaan PKK tingkat pedukuhan terdiri dari istri ketua Rukun Tetangga (RT) dan istri sekertasis RT. Berikut ini:

Tabel II. 8
Pengurus PKK Kalurahan Bangunjiwo

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Wahyu Cinto G	Ketua Dewan Penyantun	S1
2	Siti fatimah	Ketua Umum	S1
3	Sutriyanti	Wakil Ketua I	SMP
4	Asma'Iyah	Wakil Ketua II	SMP
5	Nanik Widayanti	Sekertaris I	SMP
6	Zaenati R	Sekertaris II	SMA
7	Hana Siti	Bendahara I	SMA
8	Sri Murni	Bendahara II	SMA
9	St Rohmatilah	Ketua Pokja I	S1
10	Evik Wahyuni	Sekertaris	SMP
11	Aslamiyah	Anggota	SMP
12	Wahyuti	Anggota	SMP
13	Maidatur Arifah	Anggota	SMA
14	Titik Sofiatun	Ketua Pokja II	SMA
15	Sismiyanti	Sekertaris	SMA
16	Diana H	Anggota	SMA
17	Solichah	Anggota	SMP
18	Rohyanti	Anggota	SMP
19	Harti Lasmi	Ketua Pokja III	SMP
20	Tuguh Rahayu	Sekertaris	SMA
21	St Hanifah	Anggota	SMP
22	Titik Indrayanti	Anggota	SMA
23	St. Wiyarni	Anggota	SMP
24	Nur Faizah	Ketua Pokja III	SMA
25	Sofiyunah	Sekertaris	SMP
26	Sumarsih	Anggota	D2
27	St Aisah	Anggota	SMP
28	Istinganah	Anggota	SMP
29	Sri Hidayanti	Anggota	SMP
30	Sofiyah	Anggota	SMP

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo, Tahun 2020

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD mempunyai peran strategis didalam proses pemberdayaan masyarakat desa, salah satu tugas dan wewenag yaitu mengali,

menampung mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Bangunjiwo dilakukan melalui tahapan penggalan usulan dari tingkat RT kemudian di koordinasikan ke tingkat pedukuhan yang akan dijadikan bahan untuk pembahasan dalam musyawarah pedukuhan (Musduk).

Peran BPD Kalurahan Bangunjiwo terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu untuk mengali dan menampung atas segala usulan yang disepakati secara mufakat melalui hasil Musyarawah di tingkat pedukuhan untuk diusulkan ke tingkat kalurahan agar dijadikan sekala prioritas dan di anggarkan melalui APBDes. Berikut ini merupakan prioritas di Kalurahan Bangunjiwo:

1. Bidang pembangunan fisik, antara lain: pengerasan jalan/cor blok, pembangunan irigasi sawah, pembangunan jalan kampung, kantor kalurahan, gedung RT dan pembangunan pos kampling.
2. Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: pembinaan Linmas, kaum rois, kader posyandu, kader PAUD, dan masyarakat pengrajin.

BPD Kalurahan Bangunjiwo saat ini mendorong kepada pemerintah Kalurahan agar pada anggaran tahun 2021 lebih difokuskan pada bidang pemberdayaan masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di tingkat kalurahan.

Berikut ini merupakan anggota BPD Kalurahan Bangunjiwo periode tahun 2018-2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel II. 9
Data Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sihana, S.Pd	Ketua	Padukuhan Ngentak
2	Prunomo Adi, S.TP	Wakil ketua	Pedukuhan Tirto
3	Wasiyem, S.E	Sekertaris	Pedukuhan Gendeng
4	Riyanti, S.E	Ketua bidang pemerintahan	Pedukuhan Banaran
5	Muttaqim, S.Pd	Ketua bidang kesejahteraan	Pedukuhan Jipangan
6	Mahata Jiwandono, S.Pd	Anggota	Pedukuhan Salakan
7	Eko Nurhadi	Anggota	Pedukuhan Karangjati
8	Roy Ramadhan, S.Ars	Anggota	Pedukuhan Sribitan
9	Sudarno, S.Hi	Anggota	Pedukuhan Kalipucang

Sumber: Profil Kalurahan Bangunjiwo, Tahun 2020

C. Profil Desa Wisata Kajigelem

Secara administratif Kalurahan Bangunjiwo yang berada di daerah dataran tinggi dibandingkan empat Kalurahan yang berada di Kecamatan Kasihan. Letaknya yang berada di daerah perbukitan membuat kalurahan tersebut bisa dikembangkan untuk destinasi wisata. Di Kalurahan tersebut memiliki destinasi unggulan seperti contohnya di Kasongan yang menjadi sentra kerajinan gerabah/keramik, di Jipangan yang menjadi sentra kerajinan kipas bambu, di Gendeng yang menjadi sentra kerajinan tatah singhah kulit dan di Lemahdadi yang menjadi sentra kerajinan patung batu. Ke empat

pedukuhan yang berada di Kalurahan Bangunjiwo menjadi daya tarik para wisatawan yang datang berkunjung. Berikut ini empat desa wisata yang berada di Kalurahan Bangunjiwo yaitu:

a. Kasongan

Di daerah Kasongan merupakan daerah sentra kerajinan yang paling terkenal di Kalurahan Bangunjiwo, dan menjadi salah satu aset bagi Kalurahan dan Kabupaten. Hingga saat ini nama Kasongan lebih familiar dibandingkan dengan nama Kalurahan Bangunjiwo. Lebih dari 300 pengrajin yang memiliki usaha pembuatan gerabah/keramik dengan tenaga kerja lebih dari 1000 orang, sehingga kerajinan tersebut mampu menembus pasar gerabah internasional. Sebelum masa pandemi setiap tahun diadakannya festival seni Kasongan dimana para pengunjung bisa langsung ikut membuat keramik di festival tersebut. Produk unggulan Kasongan antara lain guci, pot/vas, patung, air mancur dan wuwung. Oleh karena itu, banyak pengunjung yang tertarik untuk belajar membuat kerajinan dari tanah liat tersebut. Hal tersebut menjadi potensi yang besar bagi desa wisata tersebut khususnya pembuatan kerajinan dari tanah liat.

b. Jipangan

Pada tahun 1987 kerajinan kipas bambu mulai di produksi di Jipangan. Pada saat itu, hanya ada satu pengrajin yang memproduksi. Akan tetapi, saat sekarang ini menjadi lebih dari 30 pengrajin yang menyerap lebih dari 250 tenaga kerja. Mengingat kipas bambu merupakan produk yang banyak di cari oleh wisatawan. Maka dari itu, pemerintah

kalurahan menyadari ada potensi besar yang bisa dikembangkan. Sehingga pada tanggal 5 Maert 2014 Desa Wisata Jipangan diresmikan sebagai desa wisata dengan produk unggulannya kipas bambu.

c. Gendeng

Sebagai penghasil tatah singgah kulit (wayang) Pedukuhan Gendeng terdapat puluhan pengrajin handal yang hingga sekarang masih mempertahankan teknik pembuatan wayang kulit yang berkualitas. Membuat wayang kulit (tatah singgah kulit) merupakan seni yang membutuhkan keterampilan yang tinggi. Akan tetapi para pengerajin terus belajar untuk meningkatkan keterampilan dalam pembuatan tatah singgah tersebut. Dengan demikian di Pedukuhan Gendeng menjadi salah satu destinasi wisata yang berada di Kalurahan Bangunjiwo hingga saat ini.

d. Lemahdadi

Pedukuhan Lemahdadi merupakan pedukuhan di Bangunjiwo yang masyarakatnya memiliki penghasil sebagai pengrajin patung batu. Ada beragam jenis patung batu yang diproduksi seperti contohnya patung batu Budha, gupala, berbagai bentuk patung dan air manur. Di pedukuhan tersebut terdapat dua sentra industri kerajinan antara lain, kerajinan industri patung batu sebanyak pengerajin dan industri teraso sebanyak pengerajin.

Melihat potensi wisata yang ada di Kalurahan Bangunjiwo, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mempunyai rencana untuk mengembangkan desa wisata tersebut menjadi tujuan wisata terpadu.

Penggabungan ke empat desa wisata tersebut di kemas menjadi Desa Wisata Kajigelem atau akronim dari empat desa wisata diantaranya (Kasongan, Jipangan, Gendeng, dan Lemahdadi). Pembentukan desa wiata tersebut bertujuan untuk menggabungkan potensi wilayah Kalurahan Bangunjiwo menjadi kawasan terpadu dengan unggulan budaya lokalnya (potensi alam, kerajinan gerabah, tatah singgah, patung batu dan makanan tradisional). Program Desa Wisata Kajigelem mempunyai konsep menyatukan potensi-potensi wilayah kalurahan tersebut agar menjadi tujuan wisata yang menarik. Maka dari itu, pengembangan desa wisata tersebut diharapkan bisa memberdayakan masyarakatnya untuk ikut dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kalurahan Bangunjiwo.

Untuk membuat konsep Desa Wisata Kajigelem tentu Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo telah memasukkan usulan di dalam APBDes. Berikut ini merupakan rincian penggunaan dana APBDes untuk pengembangan Desa Wisata Kajigelem:

Tabel II. 10
Uraian Kegiatan Sub Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2020

No	Uraian kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Sub Bidang Pariwisata	Rp 65.529.000	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH)
1.1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata (Dipilih)	Rp 54.405.000	
1.2	Belanja Barang Dan Jasa	Rp 1.532.000	
1.3	Belanja Modal	Rp 52.872.500	
1.4	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	Rp 11.124.000	
1.5	Belanja Barang Dan Jasa	Rp 11.124.000	

Sumber: APBDes Bangunjiwo, Tahun 2020

Dari tabel uraian kegiatan terlihat bahwa rencana kegiatan sub bidang pariwisata menyerap anggaran sebesar Rp. 65.529.000; dengan rincian kegiatan yang dilakukan paling banyak meliputi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata yang mencapai Rp 54.405.000; dan belanja modal sebesar Rp 52.872.500; sedangkan pembangunan pariwisata tingkat kalurahan dan belanja barang jasa sama-sama sebesar Rp 11.124.000;. Sumber dana yang digunakan pada tahun 2020 tersebut bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH) di Kalurahan Bangunjiwo. Dengan dana yang telah digelontorkan bisa digunakan untuk pembangunan khususnya Desa Wisata Kajigelem karena desa wisata tersebut saat ini sedang dikembangkan menjadi tujuan utama wisatawan yang akan berkunjung ke Bangunjiwo.

Dalam pengembangan Desa Wisata Kajigelem, perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan tujuan yang diinginkan. Dengan memberdayakan masyarakat bisa menjadi terobosan untuk pengembangan desa wisata. Maka dari itu, Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo memerlukan dana dalam pemberdayaan masyarakat tersebut. Berikut ini merupakan uraian kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Bangunjiwo:

Tabel II. 11
Uraian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun
Anggaran 2020

No	Uraian Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggaran	Sumber Dana
1.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 433.765.44	DD
1.1	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	Rp 30.5677.000	PAD
1.2	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	Rp 8.859.500	DD
1.3	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp 12.482.000	DD
1.4	Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	Rp 195.800.584	ADD

Sumber: APBDes Bangunjiwo, Tahun 2020

Dari data diatas terlihat bahwa rencana dan realisasi anggaran kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat, yang terkategori paling besar jumlahnya adalah Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp 195.800.584 yang bersumber dari dana ADD pada tahun 2020. Kemudian di Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga sebesar Rp. 30.5677.000. Sedangkan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal sebesar Rp. 12.482.000. Dan yang terakhir di Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 8.859.500.

Disamping dana untuk memberdayakan masyarakat, pemerintah kalurahan juga mengeluarkan beberapa bantuan untuk para pelaku Desa Wisata Kajigelem. Dana yang di berikan tersebut semata-mata untuk

meningkatkan keterampilan para pelaku wisata maupun untuk peningkatan infrastruktur pendukung. Sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat, berikut ini merupakan bantuan yang diberikan:

1. Pelatihan ekonomi produktif untuk masyarakat Kalurahan Bangunjiwo, jumlah anggarannya sebesar Rp. 224.132.000 bersumber dari Dana Desa.
2. Pemberian berbagai peralatan (tatah kulit, tatah bambu/kayu dan tatah batu) yang berjumlah kurang lebih 200jutaan dan diberikan melalui ketua kelompok industri kerajinan yang berada di masing-masing wilayah. Dengan harapan agar termotivasi dan lebih berkembang lagi.
3. Pembangunan infrastruktur ekonomi wilayah untuk mobilitas desa wisata sebesar Rp 600.000.000.
4. Sumbangan dari calon anggota DPRD tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur Desa Wisata Kajigelem.
5. Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa pembagian kuota internet selama satu tahun, terhitung sejak tahun 2020. (Sumber: Data Diolah Pribadi Tahun 2021)

Dari hasil penjelasan diatas dapat dilihat bahwa, Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo melakukan pelatihan guna memberdayakan masyarakatnya. Selain memberdayakan masyarakat melalui ekonomi produktif dan pemberian beberapa peralatan kerajinan, Pemerintah

Kalurahan Bangunjiwo juga melakukan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu dukungannya untuk pengembangan desa wisata. Perlu diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata tidak hanya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDA) saja akan tetapi juga terkait dengan kemudahan akses untuk para wisatawan yang akan datang. Maka dari itu, Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo melakukan peningkatan dalam dua unsur tersebut yaitu dalam pemberdayaan masyarakatnya dan juga untuk infrastruktur.

Dari pemberian bantuan baik untuk peningkatan keterampilan pelaku wisata maupun pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kalurahan, kementrian dan pihak lainnya diharapkan bisa meningkatkan pendapatan para pengrajin di desa wisata tersebut. Sehingga dengan peningkatan pendapatan masyarakat bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat. Berikut ini merupakan peningkatan pendapatan para pengrajin di Desa Wisata Kajigelem:

Tabel II. 12

Nilai Produksi Kerajinan di Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020

No	Nilai Produksi Kerajinan	Pendapatan
1	Total nilai produksi kerajinan tahun 2019 semester I	Rp. 975.000.000
2	Total nilai produksi kerajinan tahun 2019 semseter II	Rp. 1.000.000.000

Sumber: Perkembangan Kalurahan Bangunjiwo, Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan pendapatan yang diterima oleh para pengrajin secara keseluruhan. Pada tahun 2019

semester I total pendapatannya sebesar Rp. 975.000.000; sedangkan pada semester II di tahun yang sama total pendapatannya mencapai sebesar Rp. 1.000.000.000;. Sehingga dari kenaikan tersebut bisa dipengaruhi dari setelah adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan infrastruktur desa wisata. Oleh karena itu, dengan pemberdayaan yang dilakukan Kalurahan Bangunjiwo bisa menambah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Kajigelem tersebut hingga berdampak pada kenaikan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andyani, Ni Wayan Giri. 2019. *Pengembangan Wisata Pedesaan & Wisata Perkotaan: Rancangan Pola Perjalanan Gelang Projo (Magelang, Kulon Progo, Purworejo) Belitung Timur. Magelang Raya*. Jakarta: Dupati Bidang Pengembangan Industri Dan Kelembagaan Kementrian Pariwisata Republik Indonesia.
- Baihakki, B. 2016. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Urban Farming Yayasan Bunga Melati Indonesia (YBMI) di Perigi Baru.
- Maryani, D. & Nainggolan, R. R. E. 2019. *Pemberdayaan masyarakat*. CV Budi Utomo: Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Rahmawati, D.E. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Fokusmedia: Bandung
- Riyanto. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Industri Kerajinan Patung Batu di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Thesis tidak dipublikasi). Tesis Program Pascasarjana STPMD APMD Yogyakarta.
- Tanzen, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras: Yogyakarta
- Yusuf, M. A. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Jurnal

- Hermawan, H. 2016. Dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105-117. Diakses dari <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/1383> pada tanggal 19 Juni 2021
- Maharani, Puan. Arif, Yahya. Kumolo, Tjahjo. 2019. *Pedoman Desa Wisata*. Jakarta: Dupati Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata. diakses dari https://biroadpim.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2020/07/002-BUKU-PANDUAN-DESA-WISATA-2020_compressed.pdf pada tanggal 19 juni 2021
- Purwanti, I. 2019. Strategi kelompok sadar wisata dalam penguatan desa wisata. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 101-107. Diakses dari <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1792> pada tanggal 19 Juni 2021
- Priasukmana, S & Mulyadin, R. M. 2001. Pembangunan desa wisata: Pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. *Info Sosial Ekonomi*, 2(1), 37-44. Diakses dari

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pembangunan+Desa+Wisata+%3A+Pelaksanaan+Undang-undang+Otonomi+Daerah%2C&btnG= pada tanggal 19 Juni 2021

Santoso, H. B. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Wisata (Studi di Taman Wisata Genilangit Desa Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang). Diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/46966/> pada tanggal 20 Juni 2021

Widyaningsih, H. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Sosial Budaya Di Desa Sendangagung, Minggir, Sleman. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 2(1), 68-76. Diakses <https://ejournal.upi.edu/index.php/Jithor/article/view/16433> pada tanggal 19 Juni 2021

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata

RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomer 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025

Peraturan Bupati Bantul Nomer 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Kecamatan Kasihan Dalam Angka 2020

Lampiran Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomer 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sumber Lain:

Diakses dari <https://bangunjiwo-bantul.desa.id/first/artikel/509> pada tanggal 25 Januari 2022

Diakses dari <https://bangunjiwo-bantul.desa.id/first> pada tanggal 21 juni 2021.

Diakses dari (<https://www.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html>) pada tanggal 17 juni 2021

Diakses dari http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/211-pariwisata pada tanggal 6 Juli 2021

Diakses dari <https://bangunjiwo-bantul.desa.id/first/artikel/1988> pada tanggal 2 November 2021